Da'wah Siyasi dengan Manhaj Nabi Muhammad SAW

Oleh : Sunu Wibirama, S.T.[1]

I. Pendahuluan

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum lainnya, boleh jadi kaum yang diperolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Janganlah para wanita memperolok-olok wanita lainnya, boleh jadi wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok….."
(Q.S. Al Hujurat : 11)

"Wahai kaum yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (zhann). Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa….."
(Q.S. Al Hujurat : 12)

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka"
(Q.S. Al An'am : 159)

"Mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasiq dan membunuhnya adalah perbuatan kufur" (H.R. Bukhari dan Muslim)

"Sesungguhnya seorang yang paling Allah benci adalah orang yang sengit dalam berdebat (berlebihan)." (H.R. Bukhari)

"Seorang mukmin bukanlah yang suka melaknat" (H.R. Tirmidzi, derajat *hasan*)

Suatu hari, saya diminta oleh seorang akh untuk menjelaskan hakikat keterlibatan umat Islam di dalam sebuah parlemen yang tidak menerapkan hukum syari'at di dalamnya. Al akh tersebut bimbang dengan maraknya partai Islam dan fenomena da'wah di bidang parlemen, serta hal-ihwal pembuatan hukum atau undang-undang yang *menurutnya* tidak dilandaskan kepada syara'. Ada apa sebenarnya ? Apakah sikap yang diambil para politisi sekaligus da'i itu salah ? Kafirkah mereka ? Musyrikkah mereka ?

Tentu, sebagai seorang *engineer* dan praktisi TI, saya layak untuk menerima berbagai celaan atau kritikan apabila nantinya makalah ini ternyata banyak mengandung kelemahan. Ya, saya bukanlah seorang ulama', apalagi seorang ahli fiqih. 'Sabukalih' kata seorang teman. 'Saya bukan ahli fiqih'. Tapi ijinkanlah saya untuk berbagi sedikit pengalaman dan telaah panjang yang dahulu sudah pernah saya lakukan pula, hanya untuk menjawab, "Benarkah Islam mengharamkan total adanya partai politik dan da'wah di parlemen ?" Kalau Anda penasaran, ikuti saja makalah ini sampai selesai. Tapi kalau Anda memang sudah *kekeuh* dengan pendapat Anda, saya minta makalah ini jangan dijadikan *bungkus tempe* atau jepit pintu. *Plis* hargai sedikit ya, minimal jadiin aja kertas pengganti untuk cetak biru skripsi atau makalah ilmiah Anda yang lain. Semoga berkenan di hati …..

---

[1] Penulis adalah staf pengajar prodi informatika di Jurusan Teknik Elektro UGM, Yogyakarta, Indonesia. Aktif di kampung dalam remaja masjid dan organisasi pemuda kampung di kelurahan Panembahan, kecamatan Kraton, Yogyakarta.

II. Apa itu Demokrasi ?

Kata orang, Demokrasi adalah ajaran orang-orang Yunani. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan. Secara harfiah (dan ini yang kemudian dianggap sebagai biang utama mengapa Demokrasi dianggap sebagai 'din' atau agama baru), Demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Di dalam buku "Agama Demokrasi"[2] halaman 39 ditulis judul dengan tulisan sangat besar, hampir separuh halaman deh kayaknya, yang berjudul "DEMOKRASI ADALAH DIN (AGAMA) KAFIR YANG BID'AH DAN STATUS PARA PENGANUTNYA ADALAH ANTARA MENJADI RABB-RABB (ORANG-ORANG YANG DIPERTUHANKAN) YANG BERFUNGSI (BERPERAN) SEBAGAI PEMBUAT SYARI'AT DAN MENJADI PENGIKUT-PENGIKUT YANG BERIBADA KEPADA RABB-RABB TERSEBUT"

Wow ! Spektakuler bukan judulnya ? Saat pertama kali melihat, saya langsung merasa *ngelu* (bahasa Jawa, berarti : pusing). Bukan karena panjangnya judul (sebenarnya iya juga seeh), tapi karena fatwa dan tuduhan yang menyamaratakan konsep demokrasi di semua negara dengan demokrasi Amerika. Anggapan bahwa demokrasi adalah syirik didasari pada pemahaman yang belum utuh. Masih parsial, bahasa gaulnya. Sesungguhnya demokrasi sudah mengalami deviasi (penyimpangan makna). Kalau mau jujur, tiap-tiap negara memiliki definisi tersendiri dari demokrasi. Demokratis di sebuah negara, belum tentu demokratis bagi negara lain bukan ? Contoh sederhana : saat Hamas menang 80% pada pemilihan umum di Palestina, bagi Amerika, ini bukan demokrasi yang diinginkan mereka. Lalu yang manakah demokrasi itu sebenarnya ?

Mereka yang mengharamkan demokrasi, termasuk Pak Ustadz Abu Muhammad sang pengarang buku ini menganggap bahwa demokrasi adalah "pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat". Adapun di dalam Islam, kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, bukan manusia : *Laa Hukmu Illa Lillah*.
Pernyataan ini memang benar, tapi konteksnya kurang tepat. Tidak ada satupun aktivis Islam yang berbicara demokrasi dan mengambil manfaat dari sistem tersebut meyakini bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu, apalagi di kalangan ulama'-ulama' mereka. Dan jika tidak ada kesamaan pandangan tentang hal ini, maka kita dapat mengembalikan hal ini kepada hukum asalnya (*bara'atul ashliyah*), yakni *mubah* atau boleh.

Ada juga yang mengafirkan demokrasi dan menganggapnya sebagai din baru karena ia berasal dari Barat yang kafir. Jika hal itu yang dijadikan alasan untuk mengharamkannya, maka kita musti baca-baca lagi kitab sirah nabawiyah Rasulullah SAW. Benarkah Rasulullah SAW pernah mengambil metode orang-orang kafir untuk maslahat da'wah Islam ? Kita lihat sama-sama, *yuk* !

1. PERANG KHANDAQ. Ingat Khandaq, ingat Salman Al Farisy, dong. Benarkah ide menggali parit murni dari kaum muslimin ? Jawabannya, bukan ! Ide menggali parit ini adalah strategi dari Majusi (Persia), kaum penyembah api. Nah, metode ini diambil Rasulullah untuk menyelamatkan serbuan orang-orang kafir ke Madinah yang sudah bergabung menjadi sebuah kekuatan besar. Jelas, nabi SAW mengambil metode orang-orang Persia yang musyrik untuk kepentingan jihad fi sabilillah.
2. PERANG BADR. Nabi SAW memanfaatkan jasa tawanan perang Badr untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin walaupun ia adalah orang

[2] "Agama Demokrasi" adalah buku karangan Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisi dengan judul asli "Ad-Dimuqratiyah Dinun", terbitan Kafayeh Cipta Media.

musyrik. Hal ini juga menjadi dasar diperbolehkannya studi ke negara Barat dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin (bukan untuk memasukkan pola pikir liberalisme atau sekulerisme. Kalau yang ini mah, musti disikat abis, *atuh* !)

3. STEMPEL. Ingat logo bukunya Harun Yahya? Ya, yang ada tulisannya Muhammad-Rasul-Allah itu *lowh*! Rasulullah pernah membubuhkan stempel ketika mengirim surat da'wah kepada penguasa di daerah Jazirah Arab sebagai bentuk pengakuan beliau terhadap kebiasaan yang mereka lakukan agar mereka mau menerima surat tersebut.

Tidak ada satu pun ketetapan syari'at yang melarang mengambil kebaikan dari pemikiran teoretis dan pemecahan praktis non muslim dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan *nash* yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hukum yang tetap. Oleh karena 'hikmah adalah milik kaum muslim yang hilang', sudah selayaknya kita merebutnya kembali. Jelasnya, Islam tidak mengajarkan tindakan 'asal comot' dari Barat tanpa timbangan Al Qur'an dan Sunnah.

III. Apakah Demokrasi Selalu Haram ?

Beberapa esensi proses demokrasi, *sebagian* dekat dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Kita tidak sedang bicara demokrasi sebagai 'agama' baru. Bukan agama. Demokrasi <u>sangat tidak layak</u> dibandingkan dengan Islam. Kenapa ? Jelas, demokrasi tidak mengajarkan kita untuk berdo'a sebelum masuk WC. Pun ia juga tidak mengajarkan aturan yang rigid tentang perdagangan, pernikahan, waris, dan sebagainya. So, jangan dibandingin karena memang Islam tiada tandingannya. Demokrasi adalah sebuah metode, wadah, cara untuk mengatur urusan orang banyak (ummat). Beberapa esensinya, antara lain :

1. Pimpinannya bukan yang mereka benci.
2. Peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki.
3. Pemimpin yang bersalah harus bertanggung jawab di hadapan masyarakat.
4. Masyarakat berhak untuk memilih dan mengganti pimpinan mereka.
5. Keseimbangan antara pemerintah / negara dengan rakyat.
6. Pengakuan atas hak asasi manusia.
7. Pengakuan atas peran serta wanita dalam proses pengaturan urusan ummat.
8. Diskusi dan penerapan musyawarah untuk mengambil keputusan.

Bila ini esensi demokrasi, maka tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Silahkan ditilik beberapa hadits yang berkenaan dengan kepemimpinan di dalam Islam, salah satunya adalah :
"Sebaik-baik pemimpin kamu-kepala pemerintahan-adalah orang yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kebaikanmu dan kamu mendoakan kebaikan untuknya. Sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah yang kamu benci dan ia membenci kamu, kamu mengutuknya dan ia mengutuk kamu" (H.R. Imam Muslim, dari Auf bin Malik).
Pun proses musyawarah dan pengambilan keputusan terbanyak, pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Mereka semua, dengan berbagai tingkat keimanannya, adalah orang yang percaya bahwa Nabi SAW sebenarnya lebih berhak memutuskan karena beliau adalah utusan Allah dengan kemampuan dan mukjizat yang sempurna.
Namun, Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita untuk menghargai pendapat yang tidak bertentangan dengan syara', dengan berbagai macam peristiwa :

1. PERANG BADR. Kasus menentukan markaz kaum muslimin. Pendapat Nabi dibantah oleh Khabab bin Al Mundzir yang mengatakan bahwa ada tempat lain yang lebih baik dan strategis, terkait dengan strategi kaum muslimin untuk menutup sumur orang kafir.
2. PERANG UHUD. Siapakah yang memutuskan untuk berperang di luar Madinah ? Para sahabat Rasulullah, dengan suara terbanyak mereka ! Nabi sebenarnya menginginkan strategi defensif di dalam kota Madinah. Tapi Nabi menerima saran para sahabat, dan akhirnya mereka berperang di luar Madinah. Kekalahan Nabi dan para sahabat tidak kemudian membuat para sahabat mencela proses musyawarah sebelumnya, kecuali Abdullah bin Ubay sang munafiqin. Ya, ia mencela bahkan membelot dari hasil syura' setelah genderang jihad ditabuh.

Tapi jika demokrasi dipahami sebagai sebuah hal yang sebaliknya, semisal :
1. Alat untuk melakukan penjajahan (dengan atas nama demokrasi)[3]
2. Alat untuk memerangi kaum muslimin.

Maka, kami berlepas diri dari kalian. *Inni barii'um minkum*.

Jelas, makna demokrasi seperti itu bukanlah makna yang dipahami oleh para aktivis Islam saat ini. Jikalau semua aturan yang dibuat manusia dari proses demokrasi adalah HARAM, lalu apakah hal-hal di bawah ini dianggap HARAM dan akan dihapus setelah syari'at Islam ditegakkan?
1. Lampu lalu lintas berikut aturan-aturannya (berjalan di kiri jalan, menghormati pengemudi yang lain, memakai helm, membawa SIM).
2. Proses pembayaran listrik, gas, air, telepon, dan masih banyak lagi.
3. Regulasi tentang PKL (Pedagang Kaki Lima), Pasar Klithikan, Pedagang Pasar.
4. Regulasi tentang obat-obatan, farmasi, dan sebagainya.
5. Regulasi tentang tata kota, penataan taman kota, dan sebagainya.

Maka, *generalisasi* bahwa semua produk demokrasi adalah produk thoghut adalah hal yang tidak tepat. Prinsipnya kembali ke hukum awal, "Jika tidak ada cara yang bertentangan dengan nash Al Qur'an dan Hadits secara langsung, dan hal tersebut membawa kemaslahatan untuk 'memaksa' kaum muslimin dengan regulasi yang Islamy dan proses penegakan syari'at Islam secara bertahap, maka hal tersebut menjadi *mubah*, bahkan bisa menjadi wajib apabila hanya ada cara tersebut untuk menegakkan Islam, tanpa adanya pertikaian dan pertumpahan darah (baca : revolusi atas nama JIHAD), serta pemberangusan gerakan Islam yang mengakibatkan da'wah mundur puluhan tahun".

Kalau murid sekolahnya yang nakal dan nyontek, apakah dengan serta merta sekolah menjadi HARAM hukumnya ?

IV. Antara Islam dan Demokrasi

Duh, capek juga *ngetik* terus. Terus terang, sebagai buatan manusia, Demokrasi sudah barang tentu beda banget dengan sistem Islam. Namun ada juga beberapa persamaannya. Ya, udah. Kita tampilin aja langsung perbandingan antara Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Islam, menurut Dr. Dhiya'uddin Ar Rais (pakar dan pemikir Islam) :

[3] *Ibid*. Hal. 145

PERSAMAAN

1. Sistem ini mengatur hubungan antara negara dan rakyat. Di dalam Islam yang jauh lebih besar dari demorasi sudah diatur hal ini, bahkan jauh lebih komplit dari ini.
2. Jika yang dimaksud demokrasi adalah sebagaimana pengertian Abraham Lincoln (*weleh, sapa kui ?*), yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebenarnya di dalam sistem Islam pun ada pengertian seperti itu, hanya saja bedanya di dalam sistem Islam rakyat harus memahami Islam secara menyeluruh (komprehensif).
3. Jika demokrasi maksudnya adalah pemisahan antara kekuasaan legislatif (pembuat UU) dan eksekutif (pelaksana), di dalam Islam ada istilah Ahlul Halli wal Aqdi / AHWA(Lembaga Syuro') sebagai perwakilan rakyat yang menetapkan UU berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, serta Imam (presiden) yang taat kepada AHWA.

PERBEDAAN

Buanyak banget bedanya. Islam lebih unggul deh. Coba kita lihat :

No	Demokrasi	Sistem Islam
1.	Sebuah wilayah dibatasi dengan berbagai macam variabel, mulai letak geografis, bahasa, adat, iklim, dll. Hal ini bertendensi membawa rasa nasionalisme buta yang dilarang oleh Islam. Jika seorang muslim mati karena membela negara tanpa diniati untuk membela Islam = mati jahiliyah.	Tidak pernah membatasi ummat dengan konsep wilayah. Dengan kata lain, dimana syahadat diucapkan disanalah letak tanah air kaum muslimin.
2.	Tujuan demokrasi ala Barat adalah tujuan duniawi semata dan materialistis	Di dalam Islam, sistem kenegaraan juga mempertimbangkan aspek ukhrawi dan inilah yang membuat segala macam aktivitas siyasay (politik) bernilai ibadah.
3.	Kedaultan mutlak di tangan rakyat, tidak peduli dengan aturan apa yang digunakan oleh negara tersebut.	Wakil rakyat menentukan Undang-Undang berdasarkan Alqur'an dan Sunnah.
4.	Bukan sistem yang komprehensif, karena buatan manusia.	Jauh lebih mulia dari Demokrasi. Karena itu, tidak layak menganggap demokrasi sebagai 'din' tandingan Islam.

Jelasnya, kita hanya menerima dan memanfaatkan hal-hal dari demokrasi yang tidak bertentangan dengan syara' . Masalahnya adalah :

1. Bagaimana kita melibatkan diri di dalam sistem yang sudah lebih dahulu eksis di sebuah lokasi yang memungkinkan syari'at Islam tegak dan kemungkaran dihapuskan (dengan menggunakan elemen negara dan legal secara politik, sehingga meminimalisir jumlah korban jiwa).
2. Bagaimana membahasakan HALAL menurut Islam menjadi LEGAL menurut Undang-Undang dan HARAM menurut Islam menjadi TIDAK LEGAL menurut Undang-Undang. Bukan perkara yang mudah dan tidak layak untuk mencela mereka yang memperjuangkannya. Kalau tidak ada aktivis Islam di parlemen, mungkin jilbab saat ini masih dilarang dan kaum muslimah tidak bisa seenaknya membeli jilbab raksasa ukuran 1,5 atau 2. (Baca deh, buku "Revolusi Jilbab").

3. Bagaimana membuat rakyat tidak pesimis dengan ulama', da'i sekaligus politisi. Selama ini mereka tersenyum *nyinyir* kalau ada da'i yang berpolitik. Bahkan sebagian menganggap politik itu HARAM dan tidak boleh seorang muslim terlibat di parlemen. Terus, apa bedanya mereka dengan para SEKULERIS yang memisahkan antara AGAMA dan POLITIK ? Islamlah yang harus mengatur politik, bukan politik yang mengatur Islam. Jangan mau memakan propaganda Yahudi, yang memecahbelah ummat dengan membuat dua golongan di dalam ummat Islam : golongan ekstrim dan golongan liberal.
4. Dan yang terpenting, bagaimana agar seluruh aktivitas da'wah, mulai dari pengajian kelompok, pengajian keliling, tadarusan, tabligh massal, karnaval da'wah, pentas nasyid dan seni Islami, lomba menulis karya tulis Islami, majalah Islam, lembaga ekonomi Islam, lembaga wakaf, lembaga pendidikan Islam, lembaga *asykariyyah* (kepanduan) Islam, organisasi kampus, sekolah dan masyarakat yang didirikan oleh aktivis Islam tidak dicap sebagai ORGANISASI TERORIS. Jawabannya, da'wah Islam harus legal, jelas, terang benderang seterang matahari, dilindungi negara dan untuk bisa legal, harus ada da'i yang berperan aktif membuat aturan yang melegalkan seluruh aktivitas da'wah di Indonesia ini. Untuk yang terakhir ini, Indonesia mengakomodasi partai dan partailah sistem (sementara) yang memungkinkan sebuah gerakan Islam memiliki payung hukum dan tidak mudah dibredel secara politis (tentu dengan rekayasa intelijen pula). Partai bukan satu-satunya, tapi ia adalah cara yang cukup untuk aman untuk mewadahi gerakan Islam yang tumbuh di negeri ini.

Lalu, bagaimana sikap kita dengan keterlibatan politisi Islam yang ada di Indonesia saat ini ?

1. Ikut menasihati dan mengawasi kinerja mereka, supaya tidak melenceng dari tujuan da'wah, yakni *Li I'la Kalimatillah* (untuk meninggikan kalimat Allah).
2. Mendukung kerja mereka dengan amal-amal nyata di lapangan. Tunjukkan jika ummat Islam ini nggak hanya bisa omong kosong dan pengajian belaka. Ummat ini butuh penolong yang juga menemani mereka saat mereka lapar, sakit, kebanjiran, dan saat rumah mereka bocor karena kehujanan. Kalau ikutan kerja bakti di kampung aja sulit, makmurin masjid di kampung males, mendingan nggak usah ngomongin syari'at Islam.
3. Sosialisasikan program pemerintah yang bisa diakses ummat Islam melalui da'i-da'i kita di parlemen. Minta mereka cerita ke masyarakat tentang dana pemerintah dan kegiatannya. Logikanya, pajak pemerintah itu sebagian besar dari ummat Islam. Kenapa uangnya harus lari untuk konser band, parade musik, bazaar, dan kegiatan mubazir lainnya ? Hanya orang cerdas yang mau memanfaatkan uang yang sudah ia sumbangkan kepada negara.
4. Berhenti mencela, mencaci maki dan mempermasalahkan hal-hal *furu'iyyah* (cabang) di dalam Islam jika tidak memiliki ilmu yang cukup. Ilmu tidak akan pernah bermanfaat jika tidak berujung pada kerja (amal). Sudah cukup ummat ini berpecah belah karena berbeda mazhab dan saling debat (*jidal*) meski mereka tidak berilmu. Lebih baik mengajar TPA daripada menghujat ulama'-ulama' kelas dunia yang bila dibandingkan dengan diri kita, wah jelas ilmu kita nggak ada apa-apanya. Berdo'a saja, semoga syari'at Islam cepat tegak di negeri ini. Maka, mulailah dengan menegakkannya pada diri kita sendiri.

Wallahu Waliyyut Taufiq
Semoga Memberikan Manfaat